

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 7592/Ses.1/04/2025

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Maret Tahun 2025
Tanggal : 17 April 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan Maret Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Maret 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Saat ini revisi anggaran masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan dan usulan penyesuaian (uraian/ target/satuan kinerja) LKPP masih dalam proses persetujuan di Bappenas sehingga capaian kinerja yang disampaikan pada laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Maret 2025 masih berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
3. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan Maret 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp28.728.913.689 (17.23%).
4. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025.
5. Mengingat sampai dengan saat ini masih belum adanya kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensi, maka penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Maret 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.000 dan belum dapat menyajikan realisasi anggaran pada level unit organisasi.
6. Sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5975/KPA/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Selama Masa Efisiensi, disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan anggaran efektif pasca efisiensi yang dipusatkan/dikonsolidasikan di lingkup Unit Organisasi di bawah Sekretariat Utama, yang dapat digunakan oleh seluruh Unit Organisasi di LKPP sesuai dengan syarat dan pedoman yang telah ditentukan.
7. Nilai IKPA LKPP bulan Maret 2025 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 69,28.
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot masing-masing indikator sebesar 50%. Mulai tahun 2024, pelaporan capaian Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi salah satu komponen penilaian pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya dilaporkan



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

setiap akhir tahun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, oleh karena itu Nilai Kinerja Anggaran LKPP belum dapat disajikan pada laporan bulanan periode Maret 2025.

9. Sampai dengan Maret 2025, LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu karena aplikasi tersebut masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2025.
10. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
 - a. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi;
 - b. Menyampaikan usulan perubahan informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$);
 - d. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta anggaran secara berkala di unit organisasi masing-masing.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Edi Kristiyanto

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

LAPORAN

MONITORING & EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI

Periode Bulan Maret

**TAHUN
2025**

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Gedung LKPP Lt 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B,
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

021-29935577
www.lkpp.go.id



SUMMARY

CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Sasaran Kegiatan

25 | 87

Sasaran Kegiatan

Indikator



Rincian Output

64

Rincian Output

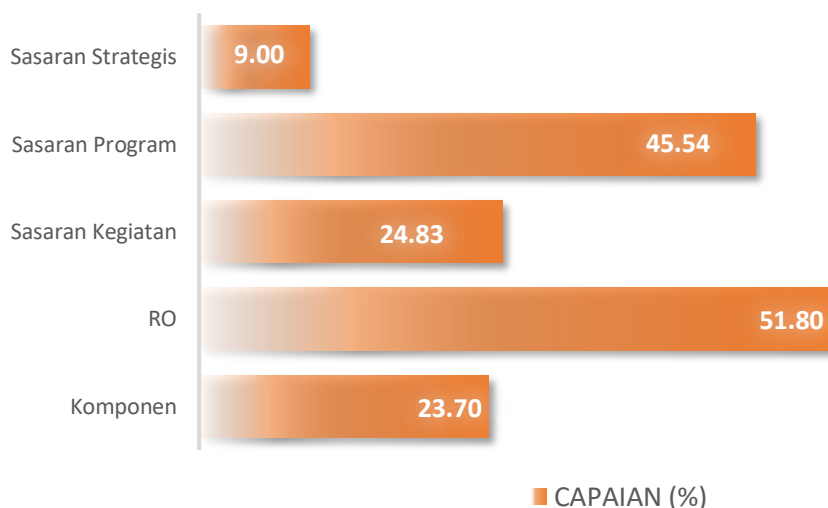
Komponen

171

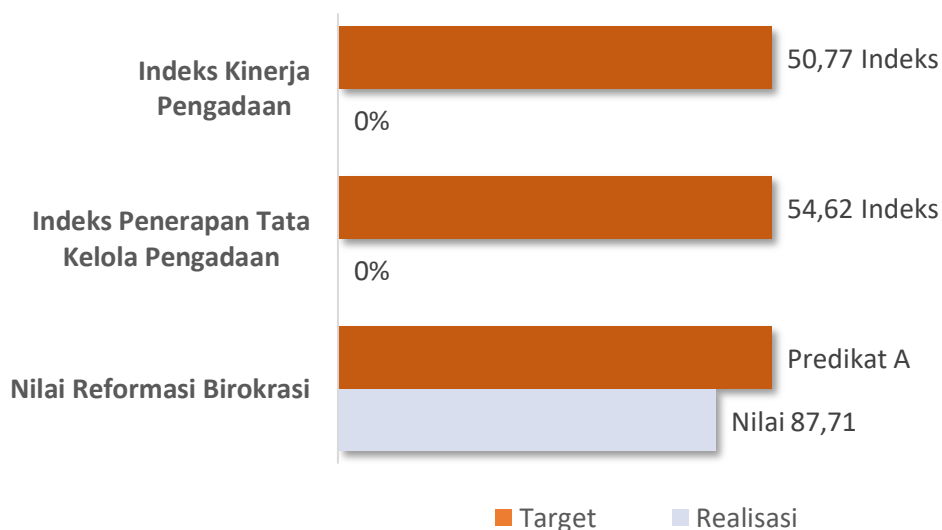
Komponen



Capaian Fisik



Sasaran Strategis



Catatan

“

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Maret 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.

”

SUMMARY

Penyerapan Anggaran

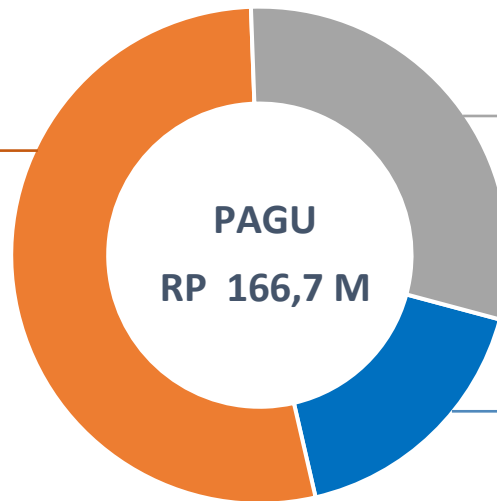


Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2025 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 31 Maret 2025

Sisa Anggaran

Rp 88.405.036.311
(53,03%)



Efisiensi Anggaran

Rp 49,578,044,000
(29,74%)

Penyerapan Anggaran

Rp 28.728.913.689
(17,23%)

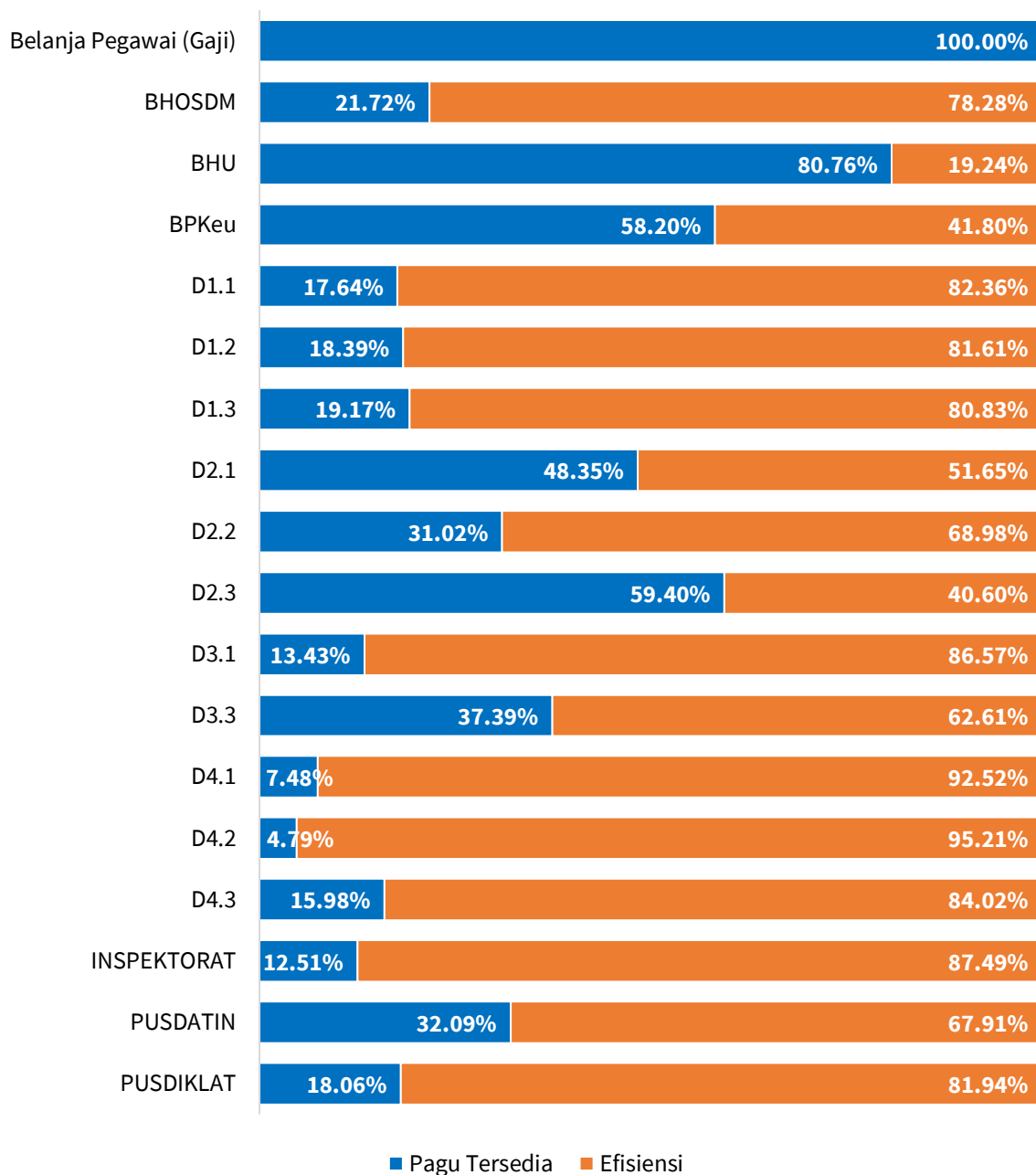
*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 31 Maret 2025

- Penyajian realisasi penyerapan anggaran LKPP dalam pelaporan ini masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.994.000, mengingat sampai saat ini belum terdapat kebijakan atas pengembalian pagu anggaran yang terkena dampak efisiensi



Pagu Anggaran dan Efisiensi Per Unit Organisasi Eselon II

Per tanggal 31 Maret 2025





Realisasi Anggaran Belanja Per Unit Organisasi Eselon II

Per tanggal 31 Maret 2025

Unit Organisasi	Pagu Awal (Rp)*	Efisiensi		Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi		
		Nominal (Rp)	%		Nominal (Rp)	% (6/2)**	% (6/5)***
1	2	3	4	5	6	7	8
BHOSDM	5.742.195.000	4,494,841,000	78.28%	1,247,354,000	339.255.726	5,91%	27.20%
BHU	44.938.473.000	8,645,334,000	19.24%	36,293,139,000	7.787.047.444	17,33%	21.46%
BPKeu	2.814.109.000	1,176,325,000	41.80%	1,637,784,000	223.958.216	7,96%	13.67%
BPKeu (Gaji)	65.901.318.000	0	0%	65,901,318,000	16.309.943.149	24,06%	24.75%
D1.1	3.170.255.000	2,610,873,000	82.36%	559,382,000	214.587.633	6.77%	38.36%
D1.2	2.100.812.000	1,714,457,000	81.61%	386,355,000	88.362.173	4.21%	22.87%
D1.3	2.598.025.000	2,099,898,000	80.83%	498,127,000	126.838.153	4.88%	25.46%
D2.1	1.963.356.000	1,014,103,000	51.65%	949,253,000	286.718.000	14,60%	30.20%
D2.2	7.521.299.000	5,188,431,000	68.98%	2,332,868,000	772.777.496	10,27%	33.13%
D2.3	1.909.723.000	775,388,000	40.60%	1,134,335,000	307.231.370	16,09%	27.08%
D3.1	3.539.260.000	3,063,811,000	86.57%	475,449,000	150.269.935	4,25%	31.61%
D3.3	3.708.029.000	2,321,421,000	62.61%	1,386,608,000	418.426.370	11,28%	30.18%
D4.1	1.944.566.000	1,799,078,000	92.52%	145,488,000	63.005.376	3,24%	43.31%
D4.2	3.060.763.000	2,914,139,000	95.21%	146,624,000	44.593.582	1,46%	30.41%
D4.3	1.984.221.000	1,667,207,000	84.02%	317,014,000	113.223.116	5,71%	35.72%
INSPEKTORAT	927.860.000	811,811,000	87.49%	116,049,000	60.363.399	6,51%	52.02%
PUSDATIN	9.118.948.000	6,192,894,000	67.91%	2,926,054,000	1.209.119.237	13,26%	41.32%

Unit Organisasi	Pagu Awal (Rp)*	Efisiensi		Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi		
		Nominal (Rp)	%		Nominal (Rp)	% (6 / 2)**	% (6 / 5)***
1	2	3	4	5	6	7	8
PUSLAT	3.768.782.000	3,088,033,000	81.94%	680,749,000	213.193.314	5,66%	31.32%
TOTAL	166.711.994.000	49,578,044,000	29.74%	117,133,950,000	28.728.913.689	17,23%	24.53%

Catatan:

- * Pagu anggaran berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- ** Persentase realisasi didapatkan berdasarkan perbandingan Realisasi Belanja Unit Organisasi (6) dengan Pagu Awal (2) LKPP.
- *** Persentase realisasi didapatkan berdasarkan perbandingan Realisasi Belanja Unit Organisasi (6) dengan Pagu Tersedia setelah Efisiensi (5).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	8
BAB I	11
MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	11
1.1 ANGGARAN.....	11
A. Pagu Anggaran	11
B. Efisiensi Anggaran.....	12
C. Anggaran Pasca Efisiensi.....	13
D. Penyerapan Anggaran	17
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL	18
A. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS	18
BAB II	20
MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	20
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)	20
A. Capaian Kinerja Fisik	20
B. Capaian Kinerja Anggaran	21
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	21
D. Rekomendasi.....	21
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	23
A. Capaian Kinerja Fisik	23
B. Capaian Kinerja Anggaran	24
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	24
D. Rekomendasi.....	24
2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	26
A. Capaian Kinerja Fisik	26
B. Capaian Kinerja Anggaran	27
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	27
D. Rekomendasi.....	28
2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	29
A. Capaian Kinerja Fisik	29
B. Capaian Kinerja Anggaran	30
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	30
D. Rekomendasi.....	30
2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)	32

A.	Capaian Kinerja Fisik	32
B.	Capaian Kinerja Anggaran	33
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	33
D.	Rekomendasi	33
2.6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	35
A.	Capaian Kinerja Fisik	35
B.	Capaian Kinerja Anggaran	36
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	36
D.	Rekomendasi	37
2.7	DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	38
A.	Capaian Kinerja Fisik	38
B.	Capaian Kinerja Anggaran	39
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	39
D.	Rekomendasi	40
2.8	DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)	41
A.	Capaian Kinerja Fisik	41
B.	Capaian Kinerja Anggaran	41
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	42
D.	Rekomendasi	42
2.9	DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)	43
A.	Capaian Kinerja Fisik	43
B.	Capaian Kinerja Anggaran	43
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	44
D.	Rekomendasi	44
2.10	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	45
A.	Capaian Kinerja Fisik	45
B.	Capaian Kinerja Anggaran	46
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	46
D.	Rekomendasi	46
2.11	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)	48
A.	Capaian Kinerja Fisik	48
B.	Capaian Kinerja Anggaran	49
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	49

D. Rekomendasi	50
2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)	51
A. Capaian Kinerja Fisik	51
B. Capaian Kinerja Anggaran	52
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	52
D. Rekomendasi	53
2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)	54
A. Capaian Kinerja Fisik	54
B. Capaian Kinerja Anggaran	55
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	55
D. Rekomendasi	56
2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)	57
A. Capaian Kinerja Fisik	57
B. Capaian Kinerja Anggaran	58
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	58
D. Rekomendasi	59
2.15 INSPEKTORAT	60
A. Capaian Kinerja Fisik	60
B. Capaian Kinerja Anggaran	60
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	61
D. Rekomendasi	61
2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	62
A. Capaian Kinerja Fisik	62
B. Capaian Kinerja Anggaran	63
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	63
D. Rekomendasi	63
2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)	65
A. Capaian Kinerja Fisik	65
B. Capaian Kinerja Anggaran	66
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	66
D. Rekomendasi	67
BAB III	68
KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69}

BAB I

MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

A. Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024, pagu anggaran LKPP tahun 2025 sebesar Rp166.711.994.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	39,53%
52 Belanja Barang	98.714.391.000	59,21%
53 Belanja Modal	2.096.285.000	1,26%
TOTAL	166.711.994.000	100%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	65.901.318.000	53.319.777.000	175.000.000	119.396.095.000
BHOSDM	-	5.682.195.000	60.000.000	5.742.195.000
BPKeu	-	2.814.109.000	-	68.715.427.000
BHU	-	44.823.473.000	115.000.000	44.938.473.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	65.901.318.000	-	-	65.901.318.000
Kedeputian 1 (D1)	-	7.869.092.000	-	7.869.092.000
D1.1	-	3.170.255.000	-	3.170.255.000
D1.2	-	2.100.812.000	-	2.100.812.000
D1.3	-	2.598.025.000	-	2.598.025.000
Kedeputian 2 (D2)	-	11.394.378.000	-	11.394.378.000
D2.1	-	1.963.356.000	-	1.963.356.000
D2.2	-	7.521.299.000	-	7.521.299.000
D2.3	-	1.909.723.000	-	1.909.723.000
Kedeputian 3 (D3)	-	7.247.289.000	-	7.247.289.000
D3.1	-	3.539.260.000	-	3.539.260.000
D3.3	-	3.708.029.000	-	3.708.029.000
Kedeputian 4 (D4)	-	6.918.050.000	71.500.000	6.989.550.000
D4.1	-	1.944.566.000	-	1.944.566.000
D4.2	-	2.989.263.000	71.500.000	3.060.763.000
D4.3	-	1.984.221.000	-	1.984.221.000
INSPEKTORAT	-	927.860.000	-	927.860.000
PUSLAT	-	3.295.782.000	473.000.000	3.768.782.000

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
PUSDATIN	-	7.742.163.000	1.376.785.000	9.118.948.000
TOTAL	65.901.318.000	98.714.391.000	2.096.285.000	166.711.994.000

B. Efisiensi Anggaran

Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan nasional yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Sesuai Besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, efisiensi anggaran LKPP didasarkan pada:

- 1) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 3) Penyampaian Rincian Nilai Efisiensi Anggaran Melalui *One on One Meeting* bersama DJA dan DJPB.

Berdasarkan dinamika tersebut, anggaran efisiensi LKPP adalah sebesar Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP sebesar Rp166,71 M dengan rincian sebagai berikut:

Program	Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.413.061.000	8.856.040.000
106.01.WA Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.164.983.000	108.277.920.000
TOTAL	166.711.944.000	49.578.044.000 (29,75%)	117.133.960.000 (70,25%)

Namun demikian mengingat sampai dengan saat ini masih belum terdapat kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensikan, maka penyampaian

pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Maret 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.

C. Anggaran Pasca Efisiensi

1. Penyesuaian Anggaran Pasca Efisiensi

Pada bulan Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. Dalam Lampiran III Perpres 12 Tahun 2025, LKPP mengampu pencapaian 2 (dua) Indikator Kegiatan Prioritas yaitu KP 07.08.02 Nilai Kinerja Pengadaan dan KP 07.08.02 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan. Pada Tahun 2025 terdapat 13 (tiga belas) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) untuk mendukung pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas tersebut.

Adanya kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, terdapat potensi dampak efisiensi anggaran terhadap pencapaian RO PN. Saat ini pagu tersedia untuk 13 (tiga belas) RO PN hanya tersedia sebesar Rp1.400.866.000 dengan postur anggaran sebagai berikut:

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
1	6323.QDG.111 Penyedia UMK yang <i>On Boarding</i> dalam Sistem Pengadaan Digital	440.000.000	440.000.000	00
2	6319.UBB.121 Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	1.200.000.000	1.200.000.000	00
3	6319.PAH.131 Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan	140.639.000	140.639.000	00
4	6319.PDA.131 Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	337.237.000	327.017.000	10.220.000
5	6319.PEC.131 Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/	668.974.000	491.869.000	177.105.000

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
	organisasi internasional /lembaga internasional			
6	6319.QDB.131 K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	366.449.000	366.449.000	00
7	6323.QDC.131 Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	364.869.000	264.638.000	100.231.000
8	6323.QDG.131 Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	719.857.000	545.361.000	174.496.000
9	6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	2.754.381.000	2.518.398.000	235.983.000
10	6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ	554.817.000	416.605.000	138.212.000
11	6321.SCF.511 Peserta pelatihan anti korupsi PBJ	450.000.000	321.312.000	128.688.000
12	6322.UAI.431 K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	269.782.000	247.560.000	22.222.000
13	6320.UAB.231 Sistem Pasar <i>Digital</i> Pengadaan Terintegrasi	1.000.000.000	586.291.000	413.709.000
TOTAL		9,267,005,000	7.866.139.000	1.400.866.000

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anggaran RO PN untuk ketercapaian output baik secara kualitas maupun kuantitas, LKPP telah mengirimkan Surat Permohonan Relaksasi Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Target Rincian Output Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 melalui surat nomor 6162/KA/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, dimana LKPP mengajukan permohonan relaksasi atas blokir efisiensi anggaran RO PN yaitu sebesar Rp7,866,139,000,-

Selanjutnya, di samping mengusulkan relaksasi blokir atas seluruh anggaran PN di atas, LKPP juga mempertimbangkan anggaran efektif pasca efisiensi, dimana terdapat 4 (empat) RO PN yang saat ini tidak tersedia anggarannya (pagu efektif Rp0,-). Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas pencapaian RO PN dan bahkan tidak dapat tercapai pada 4 RO PN tersebut. Adapun 4 (empat) RO PN tersebut adalah sebagai berikut:

- 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan,
- 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/berkelanjutan,
- 6319.UBB.121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2,
- 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang *Onboarding* dalam Sistem Pengadaan Digital.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka mengupayakan pencapaian target output RO PN, dilakukan penyesuaian anggaran melalui tukar *tagging* blokir efisiensi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk ketercapaian *output* minimal (baik secara kuantitas dan kualitas) untuk 4 RO PN yang saat ini anggaran efektifnya Rp0,- (nol).

Melalui surat Sekretaris Utama LKPP Nomor 6714/SES/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran, dilakukan penyesuaian anggaran sehingga komposisi efisiensi menjadi sebagai berikut:

Program		Efisiensi Awal (Rp)	Efisiensi Penyesuaian (Rp)	Perubahan (Rp)
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	28.413.061.000	28.256.839.000	(156.222.000)
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	21.164.983.000	21.321.205.000	156.222.000
TOTAL		49.578.044.000	49.578.044.000	0

Adapun postur anggaran LKPP setelah penyesuaian efisiensi tersebut adalah sebagai berikut:

Program		Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.256.839.000	9.012.252.000
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.321.205.000	108.121.698.000

Program	Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
TOTAL	166.711.944.000	49.578.044.000 (29,75%)	117.133.960.000 (70,25%)

2. Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Pasca Efisiensi

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan LKPP secara keseluruhan mendapatkan efisiensi belanja sebesar Rp45.578.044.000,-, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Nota Dinas Nomor 5975/KPA/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Selama Masa Efisiensi.

Melalui nota dinas tersebut, disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan anggaran efektif pasca efisiensi yang dipusatkan/dikonsolidasikan di lingkup Unit Organisasi di bawah Sekretariat Utama. Anggaran yang dikonsolidasikan bersifat bersama dan dapat digunakan oleh Seluruh Unit Organisasi di LKPP dengan syarat memperoleh **persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dengan memperhatikan **prinsip efisiensi serta Prioritas Nasional**. Pemanfaatan anggaran tersebut dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Ketentuan
1	Perjalanan Dinas	Prioritas: Program Prioritas Nasional, kegiatan dihadiri oleh Kepala LKPP dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi madya yang melibatkan pihak luar - Staf pendukung: memperhatikan prinsip efisiensi anggaran. - Usulan wajib disertai KAK, rincian anggaran, dan formulir persetujuan KPA. - Jika dibiayai anggaran pihak luar: mengikuti ketentuan biaya dan daftar peserta dari pihak tersebut.
2	Paket Meeting Dalam Kota	- Prioritas: Sama dengan perjalanan dinas. - Peserta: Hanya yang terlibat langsung dalam kegiatan. - Usulan wajib dengan KAK, rincian anggaran, dan formulir persetujuan KPA.
3	Jasa Lainnya	- Unit Organisasi tidak melakukan penambahan personil baru. - Unit Organisasi mengusulkan penambahan personil Jasa Lainnya dikarenakan berakhirnya masa kontrak/pengunduran diri dihimbau tidak melakukan penggantian atas personil tersebut, kecuali ada kebutuhan mendesak dan mendapatkan persetujuan KPA. - Perubahan kontrak yang menambah anggaran wajib pertimbangkan ketersediaan anggaran dan persetujuan KPA

No	Jenis Belanja	Ketentuan
4	Belanja Bahan	- Jamuan rapat hanya untuk kegiatan prioritas nasional dan dihadiri Kepala LKPP dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya yang melibatkan pihak luar. - Usulan harus disertai jumlah peserta dan persetujuan KPA. - Didorong <i>paperless</i> guna mendukung efisiensi belanja ATK.
5	Belanja Jasa Profesi	- Usulan disertai KAK, rincian anggaran, harus mendapatkan persetujuan KPA dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran masing-masing unit.
6	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Usulan pembelian disertai perencanaan kebutuhan serta disetujui oleh KPA

D. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2025 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp 28.728.913.689 atau sebesar 17.23%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	16.309.943.149	24.75%	49.591.374.851
52 Belanja Barang	98.714.391.000	12.353.896.790	12.51%	86.360.494.210
53 Belanja Modal	2.096.285.000	65.073.750	3.1%	2.031.211.250
Total	166.711.994.000	28.728.913.689	17.23%	137.983.080.311

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
SES (Gaji)	Rp65.901.318.000	Rp16.309.943.149	24,75%	Rp49.591.374.851
SES	Rp53.494.777.000	Rp8.350.261.386	15,61%	Rp45.144.515.614
PUSDATIN	Rp9.118.948.000	Rp1.209.119.237	13,26%	Rp7.909.828.763
D2	Rp11.394.378.000	Rp1.366.726.866	11,99%	Rp10.027.651.134
D3	Rp7.247.289.000	Rp568.696.305	7,85%	Rp6.678.592.695
INSPEKTORAT	Rp927.860.000	Rp60.363.399	6,51%	Rp867.496.601
PUSLAT	Rp3.768.782.000	Rp213.193.314	5,66%	Rp3.555.588.686
D1	Rp7.869.092.000	Rp429.787.959	5,46%	Rp7.439.304.041

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D4	Rp6.989.550.000	Rp220.822.074	3,16%	Rp6.768.727.926
TOTAL	Rp166.711.994.000	Rp28.728.913.689	17,23%	Rp137.983.080.311

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BHOSDM	Rp5.742.195.000	Rp339.255.726	5,91%	Rp5.402.939.274
BHU	Rp44.938.473.000	Rp7.787.047.444	17,33%	Rp37.151.425.556
BPKeu	Rp2.814.109.000	Rp223.958.216	7,96%	Rp2.590.150.784
BPKeu (Gaji)	Rp65.901.318.000	16.309.943.149	24,06%	Rp52.181.525.635
D1.1	Rp3.170.255.000	Rp214.587.633	6,77%	Rp2.955.667.367
D1.2	Rp2.100.812.000	Rp88.362.173	4,21%	Rp2.012.449.827
D1.3	Rp2.598.025.000	Rp126.838.153	4,88%	Rp2.471.186.847
D2.1	Rp1.963.356.000	Rp286.718.000	14,60%	Rp1.676.638.000
D2.2	Rp7.521.299.000	Rp772.777.496	10,27%	Rp6.748.521.504
D2.3	Rp1.909.723.000	Rp307.231.370	16,09%	Rp1.602.491.630
D3.1	Rp3.539.260.000	Rp150.269.935	4,25%	Rp3.388.990.065
D3.3	Rp3.708.029.000	Rp418.426.370	11,28%	Rp3.289.602.630
D4.1	Rp1.944.566.000	Rp63.005.376	3,24%	Rp1.881.560.624
D4.2	Rp3.060.763.000	Rp44.593.582	1,46%	Rp3.016.169.418
D4.3	Rp1.984.221.000	Rp113.223.116	5,71%	Rp1.870.997.884
INSPEKTORAT	Rp927.860.000	Rp60.363.399	6,51%	Rp867.496.601
PUSDATIN	Rp9.118.948.000	Rp1.209.119.237	13,26%	Rp7.909.828.763
PUSLAT	Rp3.768.782.000	Rp213.193.314	5,66%	Rp3.555.588.686
TOTAL	Rp166.711.994.000	Rp28.728.913.689	17,23%	Rp137.983.080.311

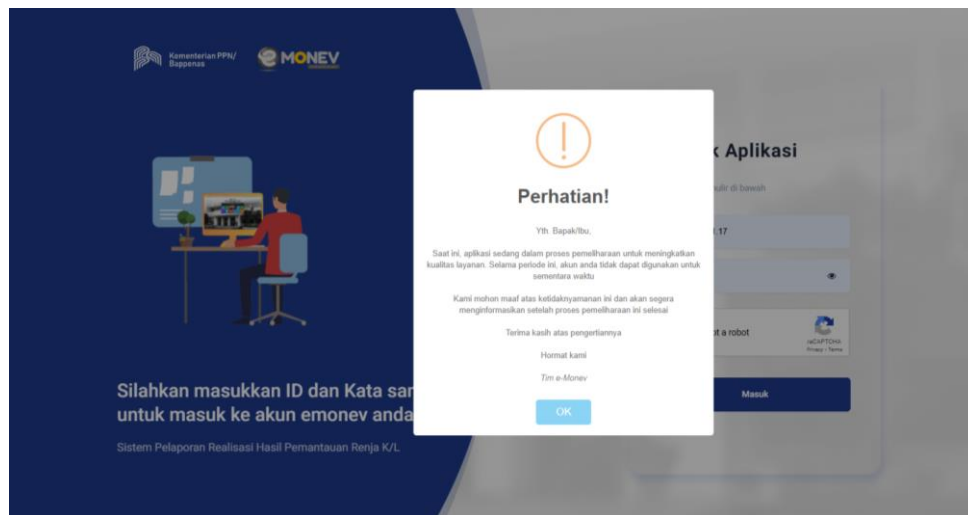
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL

A. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui E-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev_2021_v1_19032021.pdf.

LKPP sampai dengan Bulan Maret 2025 belum dapat melaporkan capaian kinerja dikarenakan aplikasi emonev BAPPENAS masih dalam proses pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

Sampai dengan bulan Maret 2025, kinerja LKPP pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025. Namun, masih terdapat dinamika perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Atas dinamika tersebut, dokumen Rencana Strategis (Renstra) LKPP tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) LKPP tahun 2025 masih dalam proses penyempurnaan, seperti perubahan dan/atau penyesuaian nomenklatur, target maupun satuan kinerja.

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01- Terpenuhi kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: 25%
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Level 3	Progres: 31%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 25%
		Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan	5 Persen	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6599.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 25%
2	6599.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	Progres: 20%
3	6599.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 22%

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
4	6599.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 25%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Maret 2025 adalah 23%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Maret 2025 adalah 23,56%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp68.715.427.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	16.309.943.149	24.75%	49.591.374.851
52 Belanja Barang	2.814.109.000	223.958.216	7.96%	2.590.150.784
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	68.715.427.000	16.533.901.365	24.06%	52.181.525.635

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BPKeu sebesar Rp 1.020.103.000 atau 1,5%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.

3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 15%
		Indeks Reformasi Hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 15%
		Skor komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 77	Progres: 28%
		Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100 Persen	Progres: 20%
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 27%
		Indeks berAKHLAK	Predikat: Cukup Sehat	Progres: 10%
		Indeks sistem merit	Predikat: Baik	Progres: 5%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6598.EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 25%
2	6598.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	Progres: 28%
3	6598.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 28,07%
4	6598.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3 Layanan	Progres: 26,62%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Maret 2025 adalah 26,92%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Maret 2025 adalah 28,24%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHOSDM adalah sebesar Rp5.742.195.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.682.195.000	339.255.726	5.97%	5.342.939.274
53 Belanja Modal	60.000.000	-	0%	60.000.000
Total	5.742.195.000	339.255.726	5.91%	5.402.939.274

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu RO – Layanan Bantuan Hukum
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHOSDM sebesar Rp Rp4.494.841.000 atau 78,28%
3. Terdapat 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks BerAKHLAK dihapuskan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan penilaian Indeks BerAKHLAK untuk Tahun 2025.
4. Terdapat informasi informal dari BKN bahwa untuk tahun 2025 penilaian sistem merit seluruh instansi ditunda karena sedang mempersiapkan kriteria penilaian sistem merit yang baru.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Predikat: Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat: Menuju Informatif	Progres: 0%
		Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat: Tersedia	Progres: 0%
2.	02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 20%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Sangat Baik	Progres: 17%
		Indeks pengelolaan aset	Indeks 3,35	Progres: 26%
		Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Predikat: Baik	Progres: 30%
		Indeks layanan keprotokolan	Predikat: Baik	Progres: 15%
		Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Predikat: Memuaskan	Progres: 15%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
1	6600.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	Progres: 26%
2	6600.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	Progres: 21,47%
3	6600.EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	1	Progres: 31.65%

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
4	6600.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	Progres: 30%
5	6600.EBC.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	Progres: 57.09%
6	6600.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	Progres: 30%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Maret 2025 adalah 32,7%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Maret 2025 adalah 27,38%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHU adalah sebesar Rp 44.938.473.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	44.823.473.000	7.721.973.694	17.23%	37.101.499.306
53 Belanja Modal	115.000.000	65.073.750	56.59%	49.926.250
Total	44.938.473.000	7.787.047.444	17.33 %	37.151.425.556

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK - Indeks pelayanan publik
 - b. IKSK – Hasil pengawasan kearsipan
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp Rp8.645.334.000 atau 19,24% dari pagu awal.
3. Pada RO- Layanan BMN komponen 053-Penyusunan laporan BMN di Tahun 2025, tidak dilakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 TA 2024 (sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: S-135/KN/KN.2/2024 tanggal 30 Desember 2024). Sehingga dilakukan penyesuaian target realisasi menjadi 3 Laporan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi PKT sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 indikator Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK] 01-Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	500 UMKK	-
2	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	3 Rancangan Peraturan	Progres: 48.25%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	-
2.	6319.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Publik	2 Rancangan Peraturan	Progres: 90%
3.	6319.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	4 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 28.00%
4.	6323.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	500 UMKM	-

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) pada bulan Maret 2025 adalah 29,50%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) pada bulan Maret 2025 adalah 29,53%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.1 adalah sebesar Rp3.170.255.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.170.255.000	214.587.633	6.77%	2.955.667.367
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.170.255.000	214.587.633	6.77%	2.955.667.367

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital
 - b. IKSK – 01 - Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum
 - c. RO - 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital
 - d. RO - 6319.AAC.111 - Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik
 - e. RO - 6319.AAH.111 - Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
 - f. RO - 6319.ABL.111 - Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D11 sebesar Rp 2.663.865.000 atau 84,03% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6323.QDG.111 Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.

2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2 Dokumen	Progres: 30.00%
2	02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan	[IKSK] 01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	15 Desa	-
3	03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU	[IKSK] 01-Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan	100 Persen	-
		[IKSK] 02-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus	100 Persen	-
		[IKSK] 03-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus	100 Persen	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus	2 NSPK	Progres: 30.00%
2	6319.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus	5 Lembaga	Progres: 30.00%
3	6319.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	5 Desa	-

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) pada bulan Maret 2025 adalah 20,00%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) pada bulan Maret 2025 adalah 6,67%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.2 adalah sebesar Rp2.100.812.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.100.812.000	88.362.173	4.21%	2.012.449.827
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.100.812.000	88.362.173	4.21%	2.012.449.827

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKS - 01 - Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan
 - b. IKS - 02 - Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus
 - c. IKS - 03 - Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D12 sebesar Rp1.781.612.000 atau 84,81% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6319.UBB 121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.

3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	01-Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan	[IKSK] 01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP	10 Persen	Progres: 33.00%
2.	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK] 02-Persentase peningkatan pelaku UMKK yang terlibat dalam PBJ	17 Persen	Progres: 25.00%
3.	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1 Dokumen	Progres: 33.00%
		[IKSK] 04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1 Rekomendasi	Progres: 18.00%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	2 Produk	Progres: 33.00%
2	6319.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	2 Lembaga	Progres: 33.00%
3	6319.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	1 Rancangan Peraturan	Progres: 33.00%
4	6319.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	2 Kegiatan	Progres: 22.00%
5	6323.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	500 UMKM	128 UMKM

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/ Progres
6	6323.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	200 Orang	127 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional (D1.3) pada bulan Maret 2025 adalah 26,5%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional (D1.3) pada bulan Maret 2025 adalah 26,25%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu D1.3 adalah sebesar Rp2.598.025.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.598.025.000	126.838.153	4.88%	2.471.186.847
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.598.025.000	126.838.153	4.88%	2.471.186.847

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D1.3 sebesar Rp 2.135.973.000 atau 82,22% dari pagu awal.
3. Terdapat 6 (enam) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu:
 - a. 6319.PDA.131 - Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah
 - b. 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan

- c. 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan
- d. 6319.PEC.131 - Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional
- e. 6323.QDG.131 - Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ
- f. 6323.QDC.131 - Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	3	Progres: 25%
		02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	58	11
		03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda	Laporan	46	11
		04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah	Buku	1	Progres 25%
		05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional	Kajian	9	Progres 10%
2	04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda	01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan	K/L/Pemda	124	Progres 20%
		02-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95%	K/L/Pemda	324	554
		03-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40%	K/L/Pemda	521	598

 Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6320.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan PBJ	Layanan	1	Progres 27.50%

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
2	6320.FAE.211	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	Laporan	4	Progres 25%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada bulan Maret 2025 adalah 26,25%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada bulan Maret 2025 adalah 26,25%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran D2.1 adalah sebesar Rp1.963.356.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.963.356.000	286.718.000	14.6%	1.676.638.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.963.356.000	286.718.000	14.6%	1.676.638.000

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
 - 01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
 - 02-Jumlah laporan *monitoring* mingguan pelaksanaan PBJ Nasional
 - 03-Jumlah laporan *monitoring* mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda
 - 05-Jumlah kajian pengembangan *platform* pengadaan nasional
 - b. Rincian Output (RO):
 - 6320.BAH.211 - Layanan Sistem Perencanaan PBJ
 - 6320.FAE.211 - Rekomendasi Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja PBJP

2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.1 sebesar Rp1,014,103,000 atau sebesar 51.65% dari pagu awal.
3. Terdapat kinerja yang realisasinya sampai dengan bulan Maret 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95%” yang telah terealisasi sebanyak 554 K/L/Pemda, dari target sebanyak 324 K/L/Pemda,
 - b. Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40%” yang telah terealisasi sebanyak 598 K/L/Pemda, dari target sebanyak 521 K/L/Pemda.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
5. Terkait dengan 2 IKSK yang realisasinya telah melebihi target, agar berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan Maret 2025. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) mengampu 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 1 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	Layanan	1	Progres 20%
		02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	Layanan	1	Progres 10%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6320.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	Layanan	1	Progres 10%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Sistem Pengadaan Digital pada bulan Maret 2025 adalah 10%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Sistem Pengadaan Digital pada bulan Maret 2025 adalah 10%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.2 adalah sebesar Rp7.521.299.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
52 Belanja Barang	7.521.299.000	772.777.496	10.27%	6.748.521.504
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	7.521.299.000	772.777.496	10.27%	6.748.521.504

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Catatan pada kinerja D2.2 di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.2 sebesar Rp5,188,431,000 atau sebesar 68.98% dari pagu awal.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Sistem Pengadaan Digital adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pasar Digital Pengadaan mengampu 2 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	Modul	1	Progres 20%
2	03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	Produk	200.000	130.080

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6320.FAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	Modul Aplikasi	1	Progres 20%
2	6323.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan	Produk	200.000	130.080

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada bulan Maret 2025 adalah 25%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada bulan Maret 2025 adalah 20%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.3 adalah sebesar Rp1,909,723,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.909.723.000	307.231.370	16.09%	1.602.491.630
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.909.723.000	307.231.370	16.09%	1.602.491.630

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.3 sebesar Rp775,388,000 atau sebesar 40.60% dari pagu awal.
2. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu 6320.FAB.231 - Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Pasar Digital Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	[IKSK] 01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10.570 Orang	10.121 Orang
		[IKSK] 02-Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1.675 Orang	2.793 Orang
		[IKSK] 03-Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10 orang	Progres: 30%
2	02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	[IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467 UKPBJ	448 UKPBJ
		[IKSK] 02-Jumlah UKPBJ ang telah siap menajdi Pusat Keunggulan Pengadaan-Proaktif	1 UKPBJ	Progres: 10%

 Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	1	Progres : 25%
2.	6321.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	Lembaga	35	9 Lembaga
3.	6321.PDH.311	SDM PBJ dan Non-JF PBJ	Orang	550	101 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada bulan Maret 2025 adalah 30%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada bulan Maret 2025 adalah 13,64%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D3.1 adalah sebesar Rp3.539.260.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3.539.260.000	Rp150.269.935	4.25%	Rp 3.388.990.065
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3.539.260.000	Rp 150.269.935	4.25%	Rp3.388.990.065

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 02 – Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda;
 - b. IKSK – 03 – Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten; dan
 - c. RO- UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.1 sebesar Rp3.063.811.000 atau 86,57%.
3. Terdapat 2 (satu) Rincian Output yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 dan RO 6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar

deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/ Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4.860 Orang	1.110 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600 Orang	190 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20 Orang	-
		Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70 Indeks	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6321.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	Lembaga	5	1
2	6321.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	75	Progres: 15%
3	6321.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ	Orang	5.480	1.309
4	6321.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP	Pedoman	1	Progres : 60%
5	6321.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP	NSPK	20	4
6	6321.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP	Unit	196	32

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Sertifikasi Profesi pada bulan Maret 2025 adalah 33.83%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Sertifikasi Profesi pada bulan Maret 2025 adalah 35%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan pagu awal Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran D3.3 adalah sebesar Rp3.708.029.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.708.029.000	418.426.370	11.28%	3.289.602.630
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.708.029.000	418.426.370	11.28%	3.289.602.630

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator rincian output yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu RO – 331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.3 sebesar Rp2.321.421.000 atau 62,61%
3. Pada IKSJ Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ dan Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ masih dalam tahap perencanaan.
4. Pada Rincian Output 331-Sarana Sertifikasi PBJP terdapat kendala Server Portal PPSDM yang terdapat di Data Center BDX yang dikelola oleh D22 terkena dampak efisiensi, sehingga kontrak pada BDX berakhir pada 31 Maret 2025. Oleh karena itu, sebelum tanggal tersebut perlu dilakukan migrasi Server PPSDM oleh tim D22 ke PDN. Migrasi sudah dimulai sejak mendapat kabar approval storage pada PDN pada pertengahan bulan Maret 2025.
5. Pada Komponen Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor yaitu kegiatan Pembentukan Asesor Kompetensi kemungkinan ditiadakan karena dampak efisiensi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	01-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L	2 Kegiatan	Progres: 25%
		02-Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L	14 Kegiatan	Progres: 25%
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan <i>clearing house</i> pengadaan	56 K/L	Progres: 25%
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	01-Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	68 K/L	1 K/L

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6323.FAI.411	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	K/L	68	1
2	6322.FAI.412	Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	K/L	20	1
3	6322.FAI.413	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	16	Progres: 25%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat pada bulan Maret 2025 adalah 25%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat pada bulan Maret 2025 adalah 25%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.1 adalah sebesar Rp 1.944.566.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.944.566.000	63.005.376	3.24%	1.881.560.624
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.944.566.000	63.005.376	3.24%	1.881.560.624

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - 01 - Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L;
 - 02 - Jumlah kegiatan *probity advice* dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L;
 - 01 - Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan;
 - 01 - Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ;
 - b. Rincian Output
 - 411 - Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ;
 - 412 - Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan *Clearing House*; dan
 - 413 - Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan *Probity Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.1 sebesar Rp1.799.078.000 atau sebesar 92,52% dari pagu awal.

3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu 01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan dengan capaian 50 K/L pada tahun 2024.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probitry Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	03-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemda	40 Kegiatan	5 Kegiatan
		04-Jumlah kegiatan <i>probitry advice</i> yang dilakukan di Pemda	27 Kegiatan	Progres: 0%
		05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda	150 Kegiatan	18 Kegiatan
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan <i>clearing house</i>	120 Pemda	104 Pemda
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	02-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	100 Pemda	13 Pemda

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6323.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Pemda	100	13
2	6322.FAI.422	Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	Pemda	20	4
3	6322.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probitry Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	150	18

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah pada bulan Maret 2025 adalah 24,72%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.2 adalah sebesar Rp 3.060.763.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.989.263.000	44.593.582,00	1.49%	2.944.669.418,00
53 Belanja Modal	71.500.000	-	-	71.500.000
Total	3.060.763.000	44.593.582,00	1.46%	3.016.169.418,00

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - 03 - Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
 - 04 - Jumlah kegiatan *probity advice* yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 05 - Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 02 - Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan
 - 02 - Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ
 - b. Rincian Output
 - 421 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
 - 422 - Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan *Clearing House*
 - 423 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.2 sebesar Rp Rp2.914.139.000 atau sebesar 95,21% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu “Jumlah Pemda yang

mengimplementasikan/menyelenggarakan *clearing house*” dan dengan capaian 100 Pemda pada tahun 2024.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 5 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	2 K/L/Pemda	Progres: 26%
2	04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	01-Persentase layanan PKA yang Optimal*	30 Persen	25 Persen
		02-Persentase layanan LPS yang Optimal*	30 Persen	71,88 Persen
		03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal*	30 Persen	33 Persen
		04-Jumlah instansi/ <i>stakeholder</i> yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	4 Lembaga	1 Lembaga

Keterangan:

*) Realisasi indikator akan terus berubah setiap bulannya dengan nilai final pada bulan Desember 2025



Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6322.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	Lembaga	4	1
2	6322.BCE.431	Perkara/Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	Perkara	500	78
3	6322.UAI.431	K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	Lembaga	2	Progres: 26%
4	6322.BCE.432	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas	Perkara	25	4

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
5	6322.BCE.433	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal	Perkara	400	108

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum pada bulan Maret 2025 adalah 29,2%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum pada bulan Maret 2025 adalah 31,8%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.3 adalah sebesar Rp 1.984.221.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif) penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.984.221.000	113.223.116	5.71%	1.870.997.884
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.984.221.000	113.223.116	5.71%	1.870.997.884

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. RO – 431 - Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak;
 - b. RO - 432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas;
 - c. RO - 433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
 - d. RO – 431 - Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.3 sebesar Rp Rp1.667.207.000 atau 84,02% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6322.UAI.431 K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan.

4. Terdapat 2 (dua) RO yang merupakan RO baru berdasarkan konsep rancangan awal Renstra LKPP dan masih dalam penyesuaian dokumen anggaran yaitu:
 - a. 6322.BCE.433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
 - b. 6322.BCE.432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Inspektorat memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1.	01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33 persen	Progres: 20%
		Indeks Pengelolaan Integritas	Predikat: Cukup	Progres: 20%
		Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72 Persen	Progres: 16.67%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Persen	Progres: 18.20%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	5664.EBA.962	Layanan Umum	Dokumen	9	Progres: 20%
2	5664.EBA.965	Layanan Audit Internal	Dokumen	12	Progres: 20%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Maret 2025 adalah 20%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Inspektorat pada bulan Maret 2025 adalah 14,4%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp927.860.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	927.860.000	60.363.399	6.51%	867.496.601
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	927.860.000	60.363.399	6.51%	867.496.601

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator Komponen yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu pada Komponen – 052-Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Inspektorat sebesar Rp811.811.000 atau 87,49%
3. Pada Komponen Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kegiatan ditiadakan karena dikeluarkannya kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 Perihal Efisiensi Anggaran K/L/PD Output kegiatan tidak dapat direalisasikan karena untuk mencapai output yang ditargetkan dibutuhkan anggaran

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 7 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	04- Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	1.300 Orang	98 Orang
		05- Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	12.000 Orang	1.517 Orang
		03- Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ	1.110 Orang	276 Orang
		04- Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ	12.110 Orang	1.976 Orang
		08- Jumlah Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ	200 Orang	78 Orang
		09- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400 Orang	48 Orang

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6321.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK	Paket	5	Progres: 12%
2	6321.DCF.511	Peserta Pelatihan PBJ	Orang	16.000	3.730 Orang
3	6321.DCF.512	SDM yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	Orang	400	48 Orang
4	6321.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	Laporan	5	Progres: 26%
5	6321.SCF.511	Peserta Pelatihan Anti Korupsi	Orang	200	78 Orang
6	6321.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	NSPK	5	Progres: 10%
7	6321.AFA.511	Pedoman Pelatihan PBJ	Pedoman	4	Progres: 30%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa pada bulan Maret 2025 adalah 20,71%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa pada bulan Maret 2025 adalah 26,70%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran Puslat SDM PBJ adalah sebesar Rp3.768.782.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.295.782.000	213.193.314	6.47%	3.082.588.686
53 Belanja Modal	473.000.000	-	-	473.000.000
Total	3.768.782.000	213.193.314	5.66%	3.555.588.686

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK-04-Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ
 - b. IKSK-05-Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ
 - c. IKSK-07-Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ
 - d. RO- Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ
 - e. RO-Media Pembelajaran Berbasis TIK
 - f. RO-Peserta Pelatihan PBJ
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Puslat sebesar Rp3.088.033.000 atau 81,93%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.

3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Pusat Data Dan Informasi (PUSDATIN) memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1.	01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Indeks 2,9	Progres: 25%
		Persentase Pemenuhan Data Prioritas	100 Persen	Progres: 25%
2.	02- Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	30 Persen	Progres: 25%
		Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 Persen	Progres: 25%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	100 Persen	Progres: 25%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 Persen	Progres: 25%
3.	03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	100 Persen	Progres: 25%
		Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	100 Persen	Progres: 25%
		Predikat Cyber Security Maturity (CSM)	Indeks 4,2	Progres: 20%
		Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	85 Persen	Progres: 25%
4.	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel	Predikat SAKIP Pusdatin	Nilai: 65	Progres: 25%
		Nilai Indeks SPBE	Nilai: 3,7	Progres: 25%
		Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	Nilai: 3,2	Progres: 25%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	7033.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Progres: 25%
2	7033.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	Layanan	1	Progres: 25%
3	7033.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	16	Progres: 25%
4	7033.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sistem Informasi	5	Progres: 25%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusat Data Dan Informasi pada bulan Maret 2025 adalah 25%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Pusat Data Dan Informasi pada bulan Maret 2025 adalah 25%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Pusdatin TA 2025 adalah sebesar Rp9.118.948.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.742.163.000	1.209.119.237	15.62 %	6.533.043.763
53 Belanja Modal	1.376.785.000	-	-	1.376.785.000
Total	9.118.948.000	1.209.119.237	13.26 %	7.909.828.76

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur berdasarkan konsep Renstra baru yaitu:
 - a. IKSK - Nilai Indeks Pembangunan Statistik
 - b. IKSK - Persentase Pemenuhan Data Prioritas
 - c. IKSK - Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran

- d. IKSK - Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e. IKSK - Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran
 - f. IKSK - Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - g. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran
 - h. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi
 - i. IKSK - Indeks Cyber Security Maturity (CSM)
 - j. IKSK - Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani
 - k. IKSK - Nilai SAKIP Pusdatin
 - l. IKSK - Indeks SPBE
 - m. IKSK - Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin
 - n. RO - Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - o. RO - Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-5, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp6.192.894.000 atau 67,91% dari pagu awal.
 3. Pada IKSK-Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran Diperlukan penambahan bandwidth untuk mengakomodir penggabungan jaringan D22 ke jaringan pusdatin- Pasca peralihan jaringan virtual private network D22 tidak dapat terhubung, diperlukan konfigurasi

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi PKT sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Maret 2025, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Maret 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Saat ini revisi anggaran masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan dan usulan penyesuaian (uraian/target/satuan kinerja) LKPP masih dalam proses persetujuan di Bappenas sehingga capaian kinerja yang disampaikan pada laporan bulanan periode Maret 2025 masih berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
3. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan Maret 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp28.728.913.689 (17.23%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	16.309.943.149	24.75%	49.591.374.851
52 Belanja Barang	98.714.391.000	12.353.896.790	12.51%	86.360.494.210
53 Belanja Modal	2.096.285.000	65.073.750	3.1%	2.031.211.250
TOTAL	166.711.994.000	28.728.913.689	17.23%	137.983.080.311

4. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025.
5. Mengingat sampai dengan saat ini masih belum adanya kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensi, maka penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Maret 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar

Rp166.711.944.000 dan belum dapat menyajikan realisasi anggaran pada level unit organisasi.

6. Sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5975/KPA/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Selama Masa Efisiensi, disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan anggaran efektif pasca efisiensi yang dipusatkan/dikonsolidasikan di lingkup Unit Organisasi di bawah Sekretariat Utama, yang dapat digunakan oleh seluruh Unit Organisasi di LKPP sesuai dengan syarat dan pedoman yang telah ditentukan.
7. Nilai IKPA LKPP bulan Maret 2025 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 69,28.
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot masing-masing indikator sebesar 50%. Mulai tahun 2024, pelaporan capaian Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi salah satu komponen penilaian pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya dilaporkan setiap akhir tahun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, oleh karena itu Nilai Kinerja Anggaran LKPP belum dapat disajikan pada laporan bulanan periode Maret 2025.
9. Sampai dengan Maret 2025, LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu karena aplikasi tersebut masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2025.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Periode Maret 2025, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Kementerian PANRB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan aplikasi SiREMON dan menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan baik level lembaga

maupun seluruh unit/ satuan kerja dengan mendorong pemanfaatan fitur “arahan dan diskusi”. Pimpinan dapat memberikan *feedback*/rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan atas permasalahan yang muncul dalam upaya pelaksanaan kinerja oleh unit organisasi sebagai bentuk pelaksanaan dialog kinerja, sehingga unit organisasi mendapat arahan yang jelas dan dapat merumuskan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai arahan pimpinan untuk mengatasi permasalahan dan mendorong pencapaian kinerja.

5. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMOMON secara berkala.

